

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia bisnis semakin berkembang pesat di Indonesia, Perusahaan yang ada telah semakin mengembangkan diri dan memperkuat strategi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam keberhasilan perusahaan yakni dengan menstabilkan kelangsungan proses produksi. Faktor yang mendorong kelangsungan proses produksi salah satunya adalah persediaan. Karena persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. (Rini Septiani Sukanda, Amelia Sinta Dewi, 2018:1).

Setiap kegiatan usaha terutama perusahaan produksi pasti memiliki persediaan, baik persediaan bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Persediaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kelancaran produksi dan penjualan, maka persediaan harus dikelola secara tepat dengan menentukan jumlah persediaan optimal, sehingga dapat memenuhi setiap permintaan yang datang. Adapun pengertian persediaan yaitu sejumlah barang yang harus disediakan oleh perusahaan pada suatu tempat tertentu guna memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan barang (Kasmir, 2010:264).

Selain tersedianya bahan baku, salah satu hal yang mesti diperhatikan adalah pengelolaan persediaan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan terutama perusahaan produksi adalah mengenai efektivitas pengelolaan persediaan yang baik. Karena persediaan merupakan asset perusahaan yang cukup besar, sehingga apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Efektivitas pengelolaan persediaan merupakan aktivitas yang selalu melekat pada persediaan barang, karena melalui pengelolaan persediaan barang yang efektif akan memberikan pendapatan maksimal bagi perusahaan (Steers, 2013:5).

Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi ataupun suku cadang. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan, baik itu perusahaan dagang, perusahaan pabrik ataupun perusahaan jasa, karena mempunyai nilai yang cukup besar dan mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya biaya operasi.

Maka dalam menunjang terbentuknya efektivitas persediaan barang yang optimal dalam perusahaan diperlukannya audit operasional terhadap efektivitas persediaan, Audit operasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek yang efisien, efektif dan ekonomis (Amin Widjaja Tunggal, 2012:52).

Selain audit operasional, pengendalian intern juga menunjang terbentuknya efektivitas persediaan, Pentingnya pengendalian intern selain karena semakin besar dan kompleksnya kegiatan perusahaan, juga karena pengendalian intern merupakan suatu metode dan prosedur, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meminimalkan segala bentuk hambatan yang dapat merugikan perusahaan. Pengendalian internal sangat menentukan dalam keberhasilan perusahaan. Pengendalian internal (Internal Control) merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya (Hermawan, 2008: 2).

Fenomena umum yang terjadi adalah kepala perwakilan BPK Provinsi Banten, Hari Wiwoho di Serang, Rabu (22/5/18) mengatakan bahwa BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam LKPD Provinsi Banten Tahun 2018 diantaranya yang berkaitan dengan kelemahan sistem prosedur pencatatan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi pengendalian sehingga perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Banten.

Hari wiwoho mengatakan bahwa "Temuan atas sistem prosedur pencatatan pengendalian intern, antara lain pemantauan, pengelolaan dan pelaporan prosedur pencatatan pada belanja persediaan dan beban persediaan tidak memadai, yang ditunjukkan antara lain karyawan pengurus barang OPD tidak tertib dalam pelaporan barang persediaan, pencatatan mutasi persediaan pada kartu stok tidak mutakhir, serta

belanja barang dan beban persediaan dalam laporan keuangan tidak memberikan informasi yang handal," saat penyerahan hasil LHP BPK terhadap laporan keuangan Provinsi Banten Tahun 2018 di gedung DPRD Banten.

Fenomena umum lain dalam penelitian ini adalah pelaksanaan audit operasional dalam informasi pengelolaan persediaan di Dinkes Bengkulu Utara yang belum memadai. Terdapat selisih persediaan dengan hasil cek bukti fisik sebanyak tujuh jenis obat yang diperiksa oleh BPK bersama Kepala Instalasi Farmasi berbeda dengan saat pelaporan, Kepala Seksi Kefarmasian dan Staf Farmasi yang disajikan. Atas kondisi tersebut, BPK menyatakan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tidak kompeten dan independennya auditor sehingga dengan kondisi tersebut mengakibatkan informasi persediaan obat yang telah ditetapkan pada instalasi farmasi belum memadai (Beni Irawan, 2019).

Fenomena umum lainnya yaitu Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) bakal memusnahkan 20 ribu ton beras karena mengalami penurunan nilai mutu persediaan alias rusak, Hal tersebut kemudian dipersoalkan oleh sejumlah pihak, termasuk oleh Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah.

Piter menilai, rusaknya beras di gudang Perum Bulog dikarenakan manajemen pengelolaan persediaan dan pola distribusi beras yang bermasalah. "Yang mengelola cadangan beras di Bulog kan adalah kepala Bulog. Beliau yang seharusnya tahu berapa jumlah beras yang ada di gudang Bulog, sudah berapa lama, dan kapan harus

didistribusikan agar tidak membusuk, terbang percuma,"katanya saat dihubungi sinarharapan.co di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Oleh karena itu Piter berkesimpulan, persoalan kesalahan atas persediaan ini menjadi tanggung jawab Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. "Tapi membusuknya beras di gudang Bulog, terlepas adanya impor yang tidak tepat, penetapan tanggung jawab yg kurang jelas, penanganan gudang yang kurang baik, dan tenaga kerja yang memuaskan adalah akibat kesalahan manajemen pengelolaan persediaan beras di Bulog. Itu adalah tanggung jawab pimpinan bulog." Permasalahan manajemen pengelolaan persediaan juga menjadi kritik pedas Piter terhadap Perum Bulog.

Fenomena khusus pada penelitian ini yang terjadi di Toko Buku Merauke Bandung, menurut kepala toko menyatakan bahwa masih ada permasalahan pada pengendalian intern di Toko Buku Merauke yang belum optimal dikarenakan oleh system prosedur pencatatan yang belum memadai pada saat pelaksanaannya yang masih sering terjadi kesalahan pencatatan persediaan yang terkadang kurang atau melebihi dari jumlah cek fisik stok yang ada digudang, akibatnya perlu dilakukan pengecekan berulang yang mengakibatkan kurang efektif dan efisien nya pengelolaan persediaan.

Serta pada saat proses auditing masih terdapat informasi (data) yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan karena system prosedur pencatatan yang belum memadai pada saat pelaksanaannya sehingga tidak dapat di verifikasi oleh pihak manajemen toko untuk melakukan perbaikan pelaporan pada prosedur penerimaan

barang dan menghambat efektif dan efisiensinya pengelolaan persediaan (Kepala Toko Buku Merauke, 2020).

Adanya pengendalian internal dan audit operasional yang baik dan teratur dalam mengelola persediaan bahan baku, maka pimpinan perusahaan akan memperoleh laporan-laporan yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, juga membantu dalam mengambil kebijakan keputusan maupun pertanggungjawaban dalam memimpin perusahaan. Seperti hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Lusiana Agustina (2008) mengenai Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang yang menunjukkan bahwa pengendalian internal yang ada pada perusahaan telah memadai dan pengelolaan persediaan barang jadi telah efektif dan Junaidi (2015) audit operasional memiliki pengaruh terhadap kecukupan persediaan barang dagang.

Pengendalian internal atas persediaan bahan baku dan audit operasional diharapkan dapat menciptakan aktivitas pengendalian terhadap perusahaan yang efektif dalam menentukan jumlah persediaan optimal yang dimiliki perusahaan, mencegah berbagai tindakan pelanggaran dan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, pelanggaran terhadap kebijakan yang diterapkan atas persediaan, serta memberikan pengamanan fisik terhadap persediaan dari pencurian dan kerusakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Pengendalian Intern dan Audit Operasional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan”**.

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Lemahnya sistem prosedur pencatatan pengendalian intern pada pengelolaan pelaporan persediaan dan ketidak patuhan dalam aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, pemantauan yang tidak mutakhir dan memadai, membuat karyawan sebagai pengurus opd tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan laporan keuangan tidak memberikan informasi yang handal.
- 2) Pada pelaksanaan audit operasional dalam informasi pengelolaan persediaan di Dinkes Bengkulu Utara yang belum memadai, Terdapat selisih persediaan dengan hasil cek bukti fisik yang berbeda dengan saat pelaporan, Tidak kompeten dan independennya auditor sehingga mengakibatkan informasi persediaan obat yang telah ditetapkan pada instalasi farmasi belum memadai.
- 3) Pemusnahan beras karena mengalami penurunan nilai mutu persediaan alias rusak dikarenakan manajemen pengelolaan persediaan dan pola distribusi beras yang bermasalah, kesalahan atas pengelolaan persediaan ini mengakibatkan membusuknya beras di gudang, karena adanya impor yang tidak tepat, penetapan tanggung jawab yg kurang jelas, penanganan gudang yang kurang baik, dan tenaga kerja yang memuaskan adalah akibat kesalahan manajemen pengelolaan persediaan.

- 4) Sistem prosedur pencatatan yang belum memadai dan informasi kriteria yang tidak sesuai.

1.2.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti memberi batasan masalah pada penelitian ini, yaitu lebih memfokuskan pada pelaksanaan pengendalian intern dan pelaksanaan audit operasional dalam menunjang efektivitas pengelolaan persediaan dan dilakukan pada seluruh pegawai Toko Buku Merauke Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di dapat, penulis dapat menyebutkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas pengelolaan persediaan.
- 2) Seberapa besar pengaruh audit operasional terhadap efektivitas pengelolaan persediaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas pengelolaan persediaan.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit operasional terhadap efektivitas pengelolaan persediaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sedikit masukan dan dapat digunakan dalam memecahkan masalah mengenai efektivitas pengelolaan persediaan pada perusahaan atau instansi yang ditinjau dari pelaksanaan pengendalian intern dan pelaksanaan audit operasional.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1) Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Pengaruh Pengendalian Intern dan Audit Operasioal terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

2) Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi sektor publik.